Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) e-ISSN : 2745 4053
Vol. 6 No. 3, Edisi Juli - September 2025 |pp 3723-3730 |DOI: http://doi.org/10.55338/jpkmn.v6i3.6618

Pemanfaatan Potensi Lokal Kampung Sebagai Penunjang Badan Usaha Milik Kampung di Kabupaten Nabire

[1)]Yan Maruanaya*, [2)]Rahayu Septyaning Mistina

[1)]Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Universitas Satya Wiyata Mandala, Nabire, Indonesia
[2)]Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan Dan Kelautan, Universitas Satya Wiyata Mandala, Nabire, Indonesia
Email Corresponding: omaruanaya@gmail.com*

INFORMASI ARTIKEL

Kata Kunci:
Potensi Sumber Daya Alam Lokal
BUMKam
Akses Antar Kampung

ABSTRAK

Pembangunan dalam konteks kampung maka data membantu untuk menciptakan program pembangunan yang lebih terarah, efisien, dan berkelanjutan, serta melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pembangunan. Potensi sumber daya alam di wilayah Kabupaten Nabire menjadi peluang dalam pengembangan usaha Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam). BUMKam memiliki peran strategis dalam mengelola sumber daya lokal dan keterlibatan aktif dari masyarakat setempat sehingga menciptakan lapangan kerja baru. BUMKam dibentuk berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan nyata masyarakat kampung. Indeks Desa Membangun untuk Provinsi Papua Tengah didominasi oleh kategori *Sangat Tertinggal* sehingga diperlukan upaya dan terobosan dalam memaksimalkan pemanfaatan potensi lokal. Berorientasi pada keberhasilan dalam pencapaian pengelolaan potensi lokal maka pengurus BUMKam harus aktif dan inovatif dalam menggagas usaha dan memiliki kemampuan mengelola usaha secara profesional, transparan, dan berkelanjutan. Akses antar kampung yang sulit sebagai kendala utama dalam percepatan usaha BUMKam.

Keywords:
Potential of local natural resources
BUMKam
Access between villages

ABSTRACT

Development in the context of the village, the data helps in creating a more targeted, efficient, and sustainable development programme, as well as involving the community directly in the development process. The potential of natural resources in the Nabire Regency area is an opportunity for business development of Village-Owned Enterprises (BUMKam). BUMKam has a strategic role in managing local resources and active involvement of the local community so as to create new jobs. BUMKam is formed based on local potential and the real needs of the village community. The Village Development Index for Central Papua Province is dominated by the Very Disadvantaged category so efforts and breakthroughs are needed in maximising the use of local potential. Oriented to success in achieving local potential management, BUMKam administrators must be active and innovative in initiating businesses and have the ability to manage businesses in a professional, transparent and sustainable manner. Difficult access between villages is a major obstacle in accelerating BUMKam businesses.

This is an open access article under the CC–BY-SA license.

I. PENDAHULUAN

Provinsi Papua Tengah, yang dimekarkan pada tahun 2022 dan beribu kota di Kabupaten Nabire, memiliki geografi yang mencakup wilayah pesisir utara dan selatan, serta pegunungan tinggi. Provinsi Papua Tengah memiliki beragam potensi sumber daya alam, mulai dari laut, hutan, kekayaan mineral, hingga agroforestri dan ekowisata. Potensi sumber daya alam sangat strategis dan memiliki peluang untuk dikelola dan dimanfaatkan secara teratur dengan prinsip berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Menyadari bahwa penduduk yang tersebar di wilayah kampung sebagai pemilik sumber daya alam maka pemerintah mendorong agar terjadi peningkatan ekonomi keluarga di tingkat kampung serta perubahan ketergantungan terhadap wilayah kota sehingga dibentuk Badan Usaha Milik Desa/Kampung (BUMDes/BUMKam) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa) terkait BUMDes, yang mana regulasi tersebut merupakan

dukungan pemerintah untuk mewujudkan kampung sebagai wilayah pertumbuhan dan penguatan ekonomi menuju kampung yang mandiri.

Penetapan regulasi dan pendirian BUMKam bertujuan untuk mewujudkan pencapaian Pendapatan Asli Kampung, program permberdayaan masyarakat dan penyelenggaran pemerintahan kampung sekaligus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemberayaan masyarakat menjadi target dalam kegiatan pembangunan sebab mampu meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan keadilan sosial yang merata serta berkelanjutan (Sumaryadi, 2005) serta pencapaian hasil perubahan sosial, memberdayakan masyarakat miskin, tidak memiliki kekuasaan, minimnya pengetahuan serta ketidakmampuan memenuhi kebutuhan infrastruktur, sosial, dan ekonomi (Rahmawati, dkk., 2017).

Pembangunan kampung yang berkelanjutan memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat setempat. Salah satu instrumen penting dalam upaya tersebut adalah Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam), yang memiliki peran strategis dalam mengelola sumber daya lokal yang berkelanjutan, keterlibatan aktif masyarakat kampung setempat dan menciptakan lapangan kerja baru (Mujanah, dkk., 2022; Wijaya, dkk., 2024). Nugrahaningsih, dkk. (2021) menyatakan bahwa BUMKam diharapkan mampu menjadi akar kemandirian yang berlandaskan pada kegiatan ekonomi masyarakat yang produktif dan efektif serta dikembangkan sesuai dengan ciri khas kampung sehingga nantinya menjadi *revenue generating* bagi kampung. Selanjutnya, Menurut Nugrahaningsih, dkk. (2021) masyarakat kampung sepenuhnya dalam melaksanan pengelolaan BUMKam memiliki asas yang kuat dengan prinsip dari kampung, untuk kampung, dan oleh kampung. Asas ini mengandung makna yang sangat penting dalam membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat kampung, dimana BUMKam dibentuk berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan nyata masyarakat kampung, memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat kampung, dan masyarakat kampung terlibat dalam mekanisme yang partisipatif dan transparan. Secara umum, asas tersebut menegaskan bahwa BUMKam adalah lembaga ekonomi yang berakar dari masyarakat kampung, berorientasi pada kemaslahatan kampung, dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat kampung itu sendiri, untuk memperkuat kedaulatan ekonomi lokal. Pencapaian tujuan jangka panjang perekonomian di tingkat kampung maka pengembangan ekonomi kerakyatan mutlak dilakukan, yang didukung kekuatan ekonomi rakyat sehingga memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat (Hasnawati, 2018).

Penataan ekonomi di tingkat kampung secara terencana dengan mengoptimalkan potensi lokal sebagai langkah strategis utnuk mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat kampung dapat memberikan nilai positif dalam penguatan BUMKam. Upaya pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya lokal secara optimal, baik potensi alam, sosial, budaya, maupun ekonomi yang tepat dan berkelanjutan menjadi fondasi kuat bagi tumbuhkembangnya unit-unit usaha yang dikelola oleh BUMKam. Pembangunan di tingkat kampung perlu dilaksanakan dengan menggerakan berbagai elemen sehingga percepatan pembanguan dapat terukur serta berimplikasi pada peningatan kesejahteraan. Berdirinya BUMKam bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien. Pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam di kampung secara optimal menjadi nilai tambah ekonomi kampung dan memberikan pendapatan bagi masyarakat dan pemerintah kampung, serta menciptakan lapangan kerja bagi warga kampung.

Masyarakat asli Papua di Kabupaten Nabire sangat kental dengan Hak Atas Tanah dan Laut atau disebut Hak Ulayat Darat dan Laut maka pemanfaatan sumber daya alam dengan mengutamakan Masyarakat Adat sebagai pengelola merupakan sentuhan mendasar dalam mendorong keterlibatan secara aktif untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dalam petuanan Hak Ulayatnya. Menyikapi proaktif Masyarakat Adat untuk keterlibatan dalam BUMKam maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kabupaten Nabire menyelenggarakan kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kampung Berdasarkan Data Indeks Desa, yang melibatkan akademisi Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire sebagai pemateri. Pihak akademisi diminta untuk menyampaikan materi tentang "*Mengurai Kemiskinan Ekonomi Kampung: Analisis Akar Masalah Dan Solusi Berbasis Bukti Untuk Kampung Yang Sangat Tertinggal.*

II. MASALAH

Potensi sumber daya alam, terutama hasil bumi dan hasil tangkapan ikan belum sepenuhnya dikelola menjadi modal utama dalam mengelola BUMKam karena ditingkat kampung memiliki berbagai dinamika

permasalahan sehingga potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal sebagai landasan pengembangan BUMKam. Salah satu faktor utama yang menghambat pemanfaatan sumber daya alam adalah terbatasnya akses yang dimiliki oleh masyarakat kampung serta kondisi geografis wilayah Papua Tengah menjadi penghambat dalam percepatan pertumbuhan BUMKam. Data Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Teringgal tahun 2024 menunjukkan bahwa Indeks Desa Membangun untuk Provinsi Papua Tengah, yaitu kategori *Maju* sebanyak 2 kampung, kategori *Berkembang* sebanyak 67 kampung, kategori *Tertinggal* sebanyak 363 kampung, dan kategori *Sangat Tertinggal* sebanyak 740 kampung.

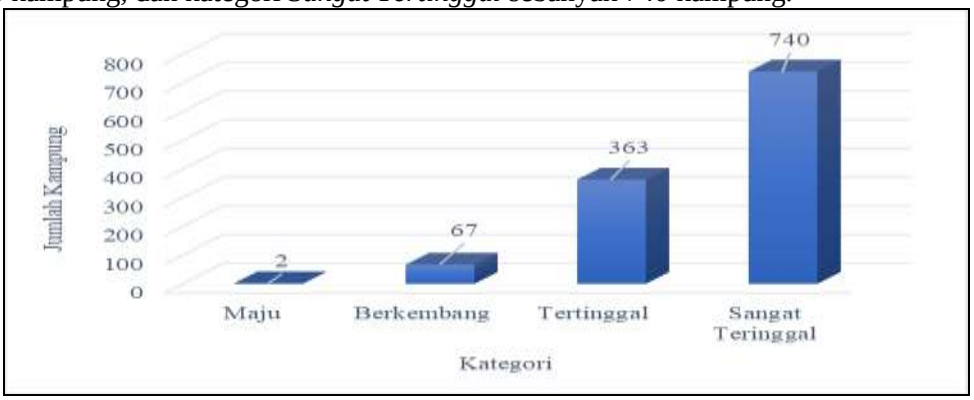

Gambar 1. Grafik Indeks Desa Membangun Provinsi Papua Tengah

Kondisi ini menggambarkan bahwa kategori kampung *Sangat Tertinggal* lebih dominan dibandingkan dengan kategori lain yang terjadi di kampung-kampung di Provinsi Papua Tengah sehingga diperlukan strategi dan upaya dalam mendorong dan memaksimalkan percepatan pembangunan ekonomi di kampung-kampung, terutama pemanfaatan potensi lokal sebagai keunggulan agar kategori *Sangat Tertinggal* menjadi berkurang dan menuju pada kategoti *Maju*.

Mengacu pada istilah kemiskinan ekonomi kampung maka analisis akar masalah dan solusi berbasis bukti untuk kampung yang sangat tertinggal terjadi karena beberapa masalah, yaitu identifikasi kebutuhan dan potensi kampung yang belum berjalan dengan baik; lemahnya ketersediaan data dari Indeks desa/kampung serta belum berjalan penyusunan program yang tepat sasaran oleh BUMKam, dimana masalah-masalah tersebut menjadi pemicu lambatnya BUMKam berkembang. Pembangunan dalam konteks kampung maka data membantu dalam menciptakan program pembangunan yang lebih terarah, efisien, dan berkelanjutan, serta melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pembangunan. Penataan ekonomi kampung dengan membangun ekonomi secara fisik serta membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk kepentingan mengelola potensi lokal demi kemajuan bersama.

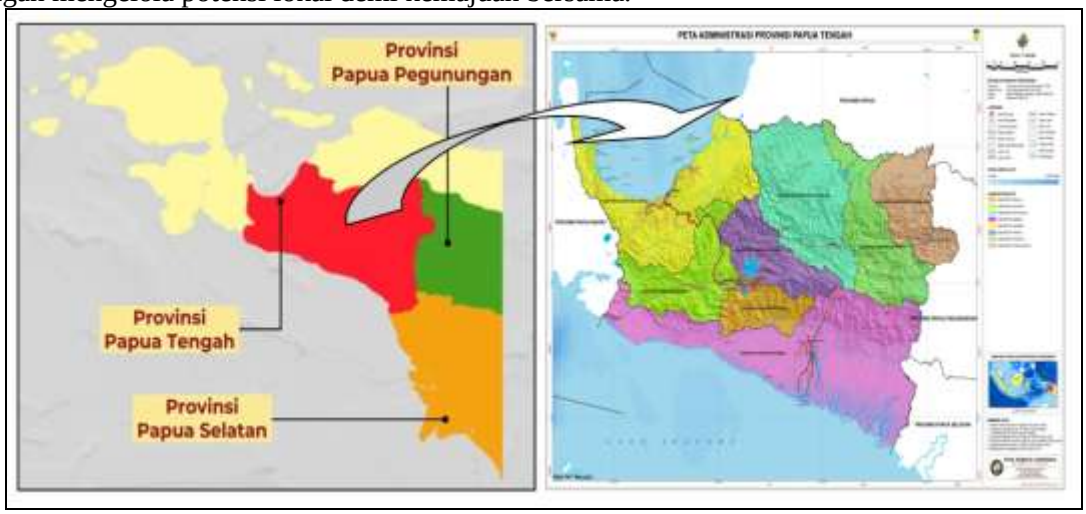

Gambar 2. Peta Provinsi Papua Tengah

Secara umum, Provinsi Papua Tengah yang terdiri dari 8 kabupaten memiliki persoalan mendasar, yaitu akses antar kabupaten dengan kabupaten serta ke Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah, dimana 6

kabupaten yang letaknya di daerah pedalaman hanya 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Paniai yang mobilisasi ke Nabire dapat menggunakan kendaraan dengan waktu tempuh berkisar antara 6 – 10 jam. Sedangkan 4 kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak serta Kabupaten Mimika hanya menggunakan transportasi pesawat terbang. Kendala akses menjadi pemicu Indeks Desa Membangun berada pada kategori *Tertinggal* dan *Sangat Tertinggal*. Khusus Kabupaten Nabire terdiri dari 15 distrik/kecamatan, 9 kelurahan dan 72 kampung.

III. METODE

Pelaksanaan PKM ditujukan kepada peserta yang terdiri dari pengurus BUMKam dan pendamping dari aparat kampung serta peninjau dari aparat Distrik/Kecamatan di wilayah Kabupaten Nabire. Orientasi PKM untuk memberikan masukan dan membuka cara pandang tentang pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal. Penyampaian materi dilakukan melalui tatap muka secara langsung dan dilanjutkan dengan diskusi. Mengacu pada istilah kemiskinan ekonomi kampung maka analisis akar masalah dan solusi berbasis bukti untuk kampung yang sangat tertinggal difokuskan pada sejauhmana potensi sumber daya alam dimanfaatkan dan di petakan sebagai data sehingga perencanaan dan pemanfaatan dilakukan berdasarkan data tersebut.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi sumber daya alam di di kampung-kampung pada setiap kabupaten di Kabupaten Nabire sangat berlimpah tetapi pemanfaatannya tergolong sangat rendah. Potensi sumber daya alam yang memiliki nila ekonomi tinggi perlu dimanfaatkan sehingga potensi tersebut tidak terbuang secara percuma sepanjang tahun. Ketersediaan sumber daya diperlukan upaya pengelolaan. Menurut Ikawati, dkk. (2001) bahwa pengelolaan adalah proses pengontrolan terhadap tindakan manusia agar pemanfaatan sumber daya dapat dilakukan secara bijaksana dengan berpedoman pada kaidah kelestarian lingkungan yang ada. Selanjutnya, Maruanaya (2023) menyatakan penduduk yang bermukim di wilayah pesisir dengan ketersedian sumber dayanya merupakan satu kesatuan dalam wujud integritas sumber daya dengan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya alam menjadi penopang utama dalam keberlanjutan kehidupan dari waktu ke waktu.

Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh tiap-tiap kampung memiliki keunggulan komperatif sebagai peluang untuk peningkatan pendapatan BUMKam sehingga kemiskinan ekonomi di tingkat kampung dipacu secara cepat menjadi kekayaan ekonomi sehingga alur perekonomian di kampung berjalan dengan baik dan penduduk mendapatkan nilai manfaat, yaitu berbelanja bahan-bahan kebutuhan di BUMKam. Orientasi pengembangan BUMKam didasarkan pada seberapa besar upaya yang dilakukan oleh pengurus BUMKam untuk memanfaatkan potensi lokal, dimana pengurus BUMKam perlu berupaya dalam menggali, memanfaatkan, dan mengelola potensi lokal, terutama produk atau jasa berbasis potensi lokal sebagai sumber pendapatan.

Berorientasi pada keberhasilan dalam pencapaian pengelolaan potensi lokal maka pengurus BUMKam harus aktif dan inovatif dalam menggagas usaha dan memiliki kemampuan mengelola usaha secara profesional, transparan, dan berkelanjutan. Kehadiran BUMKam di tiap kampung bertujuan memberikan kontribusi terhadap pendapatan kampung sehingga berdampak positif terhadap pembangunan kampung, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan warga. Kehadiran BUMKam juga berorientasi pada aspek sosial, yaitu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga kampung menjadi sentra produksi potensi lokal dan penyerapan tenaga kerja. Pengembangan BUMKam bukan sekadar mendirikan usaha, tetapi bagaimana usaha tersebut berakar pada potensi lokal, dikelola secara optimal oleh pengurus, dan memberikan manfaat nyata untuk kampung, baik secara ekonomi maupun sosial. Alur antara kampung dengan potensi lokal sebagai upaya terbentuknya BUMKam untuk peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat kampung digambarkan pada Gambar 2.

Mengurai materi tentang Kemiskinan Ekonomi Kampung : Analisis Akar Masalah Dan Solusi Berbasis Bukti Untuk Kampung Yang Sangat Tertinggal maka dibuat Gambar 2 untuk membuka wawasan dan cara berpikir kepada para peserta, dimana dalam pengabdian ini diberikan beberapa hal penting sebagai daya dorong untuk penguatan kelompok BUMKam, yaitu : 1) Kampung memiliki masyarakat adat yang memiliki hak ulayat (lokasi) terhadap kampung dan kental dengan budaya, memiliki SDM serta SDA sebagai sumber pemenuhan konsumsi lokal dan nilai ekonomi; 2) potensi lokal sebagai unggulan perlu dilakukan

identifikasi dan inventarisasi sehingga menjadi data jenis-jenis potensi lokal yang dapat dikelola dan dimanfaatkan; 3) hasil identikasi dan inventarisasi potensi lokal maka diperlukan palatihan dan pendampingan terhadap masyarakat kampung yang terpilih sebagai anggota BUMKam; 4) potensi lokal sebagai keunggulan kampung dikelola oleh BUMKam dengan mengupayakan alokasi dana dari kampung dan pemerintah sebagai modal kerja BUMKam; 5) hasil usaha dari BUMKam mendorong peningkatan pendapatan, terbuka lapangan pekerjaan serta terjadinya pertumbuhan ekonomi lokal; serta 6) tercapai kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat kampung. Penyampaian materi dan para peserta terlihat pada Gambar 3.

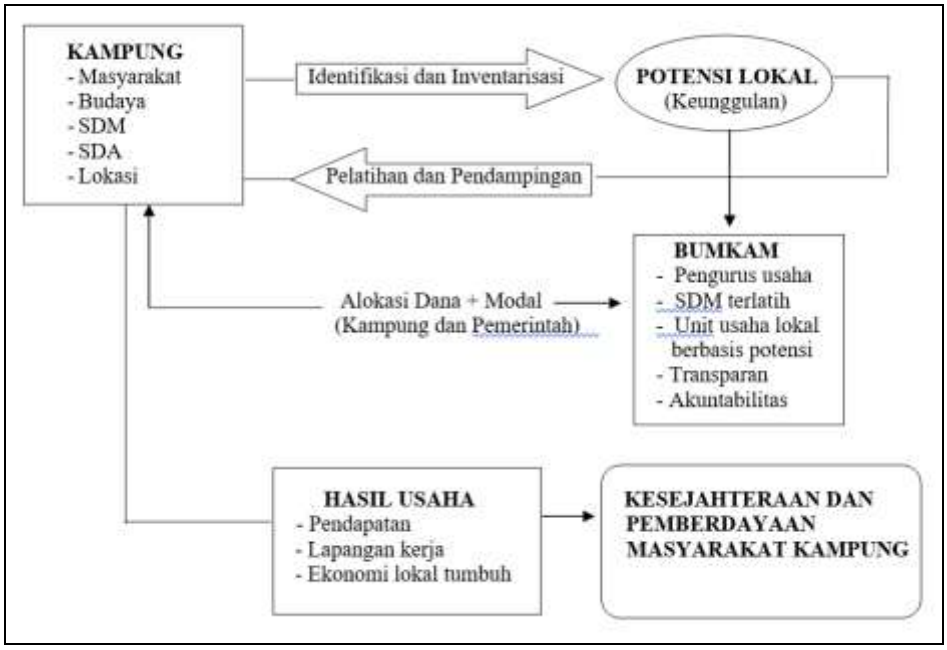

Gambar 3. Kampung dengan potensi lokal sebagai penujang BUMKam

Gambar 4. Penyampaian materi dan para peserta

Penataan ekonomi di kampung penting untuk segera dilakukan melalui pemanfaatan potensi sumber daya kampung secara optimal agar memperkuat dan memberikan kontribusi dalam penguatan BUMKam, dimana penataan ekonomi kampung perlu dilakukan secara terencana dengan mengoptimalkan potensi lokal sebagai langkah strategis dalam mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat kampung. Upaya pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya lokal secara optimal, baik potensi alam, sosial, budaya, maupun ekonomi. Pemanfaatan yang tepat dan berkelanjutan menjadi fondasi kuat bagi tumbuh dan berkembangnya unit-unit usaha yang dikelola oleh BUMKam. Menurut Listyorini, dkk. (2021) bahwa optimalisasi peran masyarakat dalam pemberdaayaan potensi lokal di wilayah kampung menjadi kunci utama dan strategis untuk pencapaian keberhasilan BUMKam. Optimalisasi peran masyarakat dalam membangun

kampung maka perlu peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMKam (Wijaya, dkk., 2024) dan peningkatan ekonomi di kampung ditentukan oleh keaktifan masyarakat dalam BUMKam sehingga memberikan kontribusi pada pembangunan kampung yang mandiri dan berkelanjutan (Gea, dkk., 2022).

Upaya mengejar kategori *Sangat Tertinggal* maka materi dibahas tentang tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Nabire beserta instansi teknis sehingga terjalin kolaborasi antara instansi teknis Pemerintah Kabupaten Nabire dan masyarakat di tingkat kampung. Menurut Rozuli (2021) kendala utama yang menjadi penghambat dalam menciptakan BUMKam yang berkelanjutan adalah kurangnya kolaborasi antara pemerintah kampung, pengelola BUMKam, dan masyarakat. Selanjutnya, Susanti, dkk. (2021) menyatakan bahwa ketidaksinambungan antara pengelola BUMKam dengan partsisipasi masyarakat kampung maka berakibat pada tidak bertahan lama pengembangan BUMKam. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kampung Berdasarkan Data Indeks Desa, yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberyaaan Masyarakat Dan Kampung Kabupaten Nabire dibuka secara langsung oleh Bupati Nabire yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, yang didampingi Kepala Dinas Pemberyaaan Masyarakat Dan Kampung Kabupaten Nabire.

Gambar 5. Sekda Kabupaten Nabire memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan

Pemaparan materi mendapat tanggapan positif dari para peserta dan dalam sesi diskusi terdapat beberapa keluhan oleh para pengurus BUMKam, yaitu 1) potensi lokal sulit di pasarkan ke pasar di kota Distrik maupun ke Nabire sebagai ibu Kota Provinsi Papua Tengah karena kendala akses sangat sulit serta transportasi sangat mahal; 2) minat pembeli yang terbatas; dan 3) nilai jual barang lebih murah dibandingkan dengan biaya transportasi. Berdasarkan keluhan para peserta maka diharapkan Pemerintah Kabupaten Nabire dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk memperhatikan secara serius dan memprogramkan program-program strategis yang berkaitan dengan membuka keterisolasian kampung maupun distrik sehingga mendorong aktifitas pasar dapat berjalan.

Gambar 6. Sesi diskusi dengan para peserta

Pembangunan di tingkat kampung perlu dilaksanakan dengan menggerakan berbagai elemen sehingga percepatan pembanguan dapat terukur serta berimplikasi pada peningatan kesejahteraan. Berdirinya BUMKam bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kampung secara efektif dan efisien. Pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam di kampung secara optimal menjadi nilai tambah ekonomi kampung dan memberikan pendapatan bagi masyarakat dan pemerintah kampung, serta menciptakan lapangan kerja bagi warga kampung. Secara keseluruhan, BUMKam memiliki peran strategis dalam menciptakan kampung yang mandiri, sejahtera, dan berkembang, dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat kampung itu sendiri. Hasil kegiatan ini diharapkan para pengurus BUMKam memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal sebagai solusi dalam mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dan tersedianya data untuk menjawab Indeks Desa Membangun di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.

V. KESIMPULAN

Potensi sumber daya alam lokal di kampung-kampung dalam wilayah Kabupaten Nabire tersedia secara melimpah dan beragam. Kekayaan ini mencakup sektor pertanian, perikanan, kehutanan, serta hasil bumi lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Apabila dikelola secara baik, berkelanjutan, dan berbasis pada kearifan lokal, potensi ini dapat menjadi motor penggerak utama perekonomian kampung. Hadirnya Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) menjadi salah satu solusi strategis dalam mendorong pengelolaan potensi sumber daya alam tersebut.

BUMKam memiliki peran penting sebagai lembaga ekonomi kampung yang mampu mengelola usaha-usaha produktif, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat kemandirian ekonomi lokal. Dengan dukungan kapasitas kelembagaan, permodalan, dan pendampingan yang tepat, BUMKam dapat menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi di tingkat kampung. Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Nabire, masyarakat kampung, dan pemangku kepentingan lainnya perlu terus diperkuat untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat kampung di Kabupaten Nabire.

Kendala akses antar kampung dengan kampung lain serta ke Nabire sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Tengah menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Nabire**.** Keterbatasan infrastruktur jalan dan transportasi telah menghambat mobilitas masyarakat, distribusi hasil produksi, dan pengembangan ekonomi lokal secara optimal. Oleh karena itu, ke depan, peningkatan dan pembukaan akses transportasi menjadi prioritas penting untuk BUMKam agar proses distribusi barang, pelayanan publik, serta pembangunan di tingkat kampung dapat berjalan lebih lancar, efisien, dan merata. Terbukanya akses diharapkan dapat memperkuat konektivitas antar wilayah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal di seluruh kampung dalam wilayah Kabupaten Nabire.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pelaksanaan PKM ini dapat terselesai karena dukungan pihak kampus dan Pemerintah Kabupaten Nabire. Untuk itu diucapkan terima kasih kepada: 1) Rektor Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire yang memberikan dukungan penuh untuk kegiatan PKM; dan 2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kabupaten Nabire yang meibatkan pihak Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire untuk menyampaikan materi.

DAFTAR PUSTAKA

Gea, I. V., Saleh, M., & Suharto, R. B. (2022). Peranan corporate social responsibility (CSR) terhadap tingkat pembangunan desa. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen*, *18*(3), 551–560. https://doi.org/10.29264/jinv.v18i3.11545.

Hasmawati Fifi, 2018. Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal. Jurnal Pengembangan Masyarakat, Vol. 5, No. 54. http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/PEMAS/article/download/4986/2288.

Ikawati, Y, P.S. Hanggarawati, H Parlan, H. Hardini dan B. Siswodihardjo, 2001 . Terumbu Karang di Indonesia. Jurnal Ilmiah Platax Vol. I-1, September 2012.

Listyorini Haniek, Sapto Supriyanto, Pranoto Hadi Prayitno, Gana Wuntu, Mochamad Miswanto Gunawan, 2021. Penguatan Kelembagaan Pokdarwis Dalam Merintis Desa Wisata Melalui Penciptaan Identitas Dan Kapabilitas Perencanaan Organisasi. *Jurnal Masyarakat Mandiri*, Vol. 5, No. 2. Hal. 491-504. https://doi.org/10.31764/jmm.v5i2.4083.

Maruanaya Y., 2023. Kemunculan Hiu Paus (*Rhincodon Typus*) Berdasarkan Kondisi Faktor Lingkungan Di Perairan Kwatisore, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Laporan Hasil Penelitian. Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan Dan Kelautan, Universitas Satya Wiyata Mandala, Nabire.

Mujanah, S., Abdullah, L., Aulia Fijannah, E., Kaffi, A., dan Baril Haq, C., 2022. Pengembangan desa Wisata 1001 Bunga untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Lokal. Untag Surabaya Press.

Nugrahaningsih Putri, Sri Hanggana, Sri Murni, Santoso Tri Hananto, Andi Asrihapsari, M. Syafiqurrahman, Renata Zoraifi, dan Sri Hantoro, 2021. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Kewirausahaan Dan Pemasaran Digital Pada Bumdes Blulukan Gemilang. *Kumawula : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 4, No.1. Hal. : 8 – 14. DOI: https://doi.org/10.24198/kumawula.v4i1.29574.

Rahmawati; Murni, S; Suhardjanto, D; Iswanto; Sawitri, D. (2017). *Green Entrepreneurship: Konsep dan Aplikasi di desa Eduwisata Hijau Sukunan Yogyakarta.* Yogyakarta: Expert.

Rozuli, A. I., 2021. Praktik Akumulasi Lebenswelt Sebagai Basis Strategi BUMDes Yang Berkelanjutan. *Jurnal Transformative*, Vol. 7, No. 2. Hal.: 201–225.

Sumaryadi, 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: CV. Citra Utama.

Susanti, I., Syairozi, M. I., dan Lukman, H. Y. W., 2021. Analisis Sistem Manajemen Dalam Pengelolaan Bumdes Di Desa Bluluk. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 5, No. 2. Hal.: 701–710.

Widjaja Hinijati, Agus Salam, Asfahani, Eko Adhy Setiawan, 2024. Optimalisasi Peran Masyarakat Dalam Membangun Desa Melalui Pengembangan Bumdes. *Communnity Development Journal*, Vol.5 No. 5. Hal. 10237-10242.